

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SELAMA PROSES PENANGANAN COVID-19 DAN VAKSINASI

JULY 19, 2021



TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY



Pada tanggal 18 Mei 2021, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Medalink bersama Transparency International mengadakan webinar bertajuk Transparansi dan Akuntabilitas selama Proses Penanganan COVID-19 dan Vaksinasi. Selama webinar tersebut, praktik baik OGP Local dari berbagai provinsi di Indonesia untuk mengenalkan program pemerintah selama COVID-19. Setelah itu, kedua OMS akan menanggapi dengan penelitian mereka yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas.

Pembicara pertama dalam webinar adalah Bapak Benny Tanaya dari OGP Local Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam sesi ini, Pak Benny memaparkan tentang apa yang telah dilakukan di Sumbawa Barat untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas selama COVID-19.

On 18 May 2021, Civil Society organizations (CSO) Medalink alongside Transparency International held a webinar titled Transparency and Accountability during COVID-19 Handling process and Vaccination. During the said webinar, a couple best practices will be showcased consisting of Local Open Government Chapters from different provinces in Indonesia for different government programs that was introduced during COVID-19 and at the same time, both CSO's will respond to their showcases with their research in relations to Transparency and Accountability.

The first speaker in the webinar is Mr. Benny Tanaya from Open Government West Sumbawa. During this session, Benny presented about what has already been done in West Sumbawa to uphold transparency and accountability during COVID-19.

Pak Benny menyatakan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat telah meresmikan kegiatan “gotong royong” melalui peraturan daerah untuk memastikan bahwa semua pihak dapat diikutsertakan dalam urusan pemerintahan. Pak Benny menilai tingkat partisipasi tersebut membuat Sumbawa Barat menjadi kawasan yang memiliki tingkat COVID-19 yang relatif rendah.

Selain Perda Gotong Royong, Pak Benny juga menginformasikan bahwa Sumbawa Barat berhasil memenuhi Permenkes No 3 Tahun 2014 tentang Standar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tengah pandemi. Sumbawa Barat sudah berhasil mengubah sanitasi dasar dan perilaku higienis warganya. Standar ini mencakup 5 pilar yang meliputi bebas dari buang air (BAB) besar sembarang, pengelolaan air minum dan makanan yang aman di tingkat rumah tangga, ketersediaan fasilitas cuci tangan, serta pengelolaan sampah dan limbah di tingkat rumah tangga. Pak Benny menyatakan keberhasilan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan yang meliputi TNI Polri, Babinsa serta Posyandu setempat juga terlibat dalam proses pemberdayaan dan proses pembangunan dan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pedoman yang jelas tentang keterlibatan komunitas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat memberikan efek baik dengan meningkatkan mentalitas dan keimanan masyarakat setempat. Sumbawa Barat mengadakan forum konsultasi publik setiap hari Jumat yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh DPR, DPRD dan POLRI.

Benny stated that West Sumbawa province has already formalized the act of “gotong royong” through local regulations in order to make sure that all parties could be included in government affairs. Benny believed that this level of participation has led to the fact that out of all the provinces In NTB, West Sumbawa regency is a green zone or area that has a relatively low level of COVID-19.

Other than Local regulations for Gotong Royong, Benny also informed West Sumbawa success in fulfilling the Ministry of Health Regulations No 3 Year 2014 Standards for Community Based Total Sanitation Standards (STBM) in the midst of a public health pandemic, West Sumbawa have already succeeded in influencing basic sanitations and hygiene behaviours of their citizens. This standard includes 5 pillars that includes free from public defecations (ODF), safe drinking water and food management at the household level, availability of hand washing facilities as well as waste management at the household level. Benny stated that this success would not be possible without the cooperation from various stakeholders that includes TNI Polri, Babinsa Bakantibmas as well as local posyandu are also involved within the process of empowerment and development process and this would not have been possible without a clear guidelines on community involvement.

Other than this, he further stated that community involvement improves the mentality and faith of the local community. West Sumbawa holds a public consultation forum every Friday that is open to the public and attended by DPR, DPRD and POLRI.

Dalam forum ini, masyarakat dapat secara terbuka menyampaikan keprihatinan mereka kepada pihak-pihak tersebut sementara camat dan perwakilan desa juga datang untuk mengawal proses ini. Sebagai penutup presentasi ini, beliau meyakini bahwa daerah lain dapat belajar dari Sumbawa Barat dalam hal transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan contoh Sumbawa Barat.

Pembicara kedua adalah Bapak Ir. Djoko Gunawan M.T dari Sekretariat Daerah Brebes. Pak Djoko mempresentasikan Aplikasi Brebes untuk Jaminan Sosial (“Sambang Bansos”) selama COVID-19. Sebelum memperkenalkan aplikasi, ia mengatakan terlebih dahulu bahwa tingkat kemiskinan di Brebes meningkat selama pandemi COVID-19 yang mana ada 431.897 orang yang hidup di bawah kemiskinan. Hal ini juga terlihat dari adanya subsidi pemerintah daerah sebesar Rp 99.097.138.689 yang ditujukan untuk penanganan COVID-19, proses Vaksinasi serta insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan.

Aplikasi Sambang Bansos ditargetkan untuk membantu Dinas Sosial setempat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengelola penyimpanan data dan ketidakabsahan di Brebes. Penggunaan aplikasi ini membuktikan bahwa data ganda, pendaftaran data pribadi yang tidak tersedia pada level online serta perbedaan antara data pribadi dan SIAK. Hingga 18 Mei, data tersebut telah digunakan untuk keperluan jaminan sosial bagi 37.982 orang. Selain dimanfaatkan secara langsung, aplikasi sambang bansos juga dimanfaatkan untuk perbaikan data DTKS melalui operator online. Hal ini berhasil memperbaiki 4.507 data rumah tangga. Di Brebes, 17.318 orang dimasukkan dalam data online. Kedepannya, Djoko berharap aplikasi ini bisa menjadi awal untuk masa depan Satu Data di Brebes.

During this forum, the public can openly give out their concerns to these parties while the district head and village representative also come to oversee this process. To conclude this presentation, Benny believes that other regions could learn from West Sumbawa in terms of transparency and accountability using the West Sumbawa Example.

The second speaker includes Ir. Djoko Gunawan M.T from Brebes Local Secretariat. Djoko presented Brebes Applications for Social Securities (“Sambang Bansos”) during COVID-19. Prior to the introductions to the applications, he stated first that the poverty rate in Brebes increased during the COVID-19 pandemic where there exists 431, 897 people living under poverty line with local government subsidies amounting to Rp 99,097,138,689. This was targeted towards COVID-19 handlings, Vaccinations process as well as incentive given to health workers.

Sambang Bansos applications were targeted towards helping the local social services and Local Community and Village Empowerment Services to manage data irregularities and invalidity in Brebes. The usage of this application proves that double data, personal data registration that is not available on an online level as well as the differences between personal data and SIAK data. Up until 18 May, the data have already been utilized for social security purposes for up to 37,982 people. Other than direct utilizations, sambang bansos app is also being utilized to repair the DTKS data through an online operator. it succeeded in repairing 4,507 household data. In brebes, 17,318 people were included within the online data. In the future, Djoko hoped that this app could be the head start for the future of One Data in Brebes.

Pembicara selanjutnya berasal dari Kabupaten Banggai, Bapak Ramli Tongko dari Badan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) yang memaparkan tentang inovasi strategis di kabupaten. Pertama, adanya inovasi pasar tani *online* di Kota Luwuk untuk membantu para pedagang *offline* mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pemasaran *online* produk petani lokal dengan bermitra dengan dinas perhubungan setempat dan Draiv Startup. Ini adalah contoh nyata inovasi produk lokal dimana ojek Draiv juga ditemukan di Kabupaten Banggai. Program ini sukses besar di tengah panasnya pandemi COVID-19 ketika sebagian besar warga setempat melakukan *social distancing* di rumah. Inovasi ini juga merupakan produk kerjasama dengan perbankan dalam melakukan program CSR untuk membuat gerai baru. Jumlah petani yang terlibat dalam program tersebut meningkat menjadi 83 dari 29. Ia berharap provinsi lain dapat belajar dari Banggai dalam hal mendukung tindakan pembatasan sosial.

Contoh praktik baik terakhir berasal dari Semarang. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Semarang, Dr. Widoyono, MPH, menampilkan aplikasi Victori yang memiliki data terkait vaksin terintegrasi di Semarang. Aplikasi ini menampilkan data zonasi mikro dan tempat vaksinasi di seluruh Semarang. Kedepannya, aplikasi ini akan dikembangkan untuk menyertakan data lansia. Urgensi ini disebabkan karena sebagian besar lansia masih enggan divaksinasi akibat *hoax* yang beredar di masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah Jawa Tengah melakukan beberapa strategi agar lansia dapat divaksinasi misalnya kampanye kesehatan masyarakat dengan tokoh agama setempat serta melakukan strategi vaksin di rumah.

The next speaker originated from the Banggai Regency, Mr Ramli from Local Development Agency (BAPPELITBANGDA) presenting about the strategic innovations within the regency involves creating an online farmer market in the Luwuk City to help the offline sellers to gain a better livelihood. This activity is being facilitated by the local government through online marketing for local farmers' products by partnership with the local transportation agency draiv. This is a real example of local product innovation: the Draiv motorcycle taxi is also being invented in Banggai Regency. This program is a huge success in the heat of the COVID-19 pandemic in a situation where most of the local citizens were conducting social distancing at home. This innovation is also a product of cooperation with banks in conducting CSR programs to create new stores where simultaneously, the number of farmers that were involved in the program increased to 83 from 29. He hoped that other provinces could learn from Banggai in terms of supporting social distancing measures.

The last best practices examples were using examples from Semarang. The representative from Semarang Health offices Dr. Widoyono MPH showcases the Victori applications, an integrated vaccine related data in Semarang. This app showcases micro-zoning data and vaccination places in all of Semarang. In the future, this app will be developed to include data for the elderly. This urgency was caused by the fact that most elderly are still reluctant to be vaccinated due to hoaxes that circulate among society. Based on this fact, the government of Central Java conducted several strategies to get elderly to be vaccinated that includes public health campaigns with local religious figures as well as conducting a vaccine at home strategy.

Setelah menampilkan inovasi pemerintah daerah, webinar dilanjutkan dengan tanggapan perwakilan Media Link dan Transparency International. Dalam paparannya, Peneliti Transparency International Indonesia Alfin menanggapi 2 krisis sekaligus yang meliputi pandemi COVID-19 dan korupsi. Alfin dari TII percaya bahwa krisis harus menjadi peluang untuk memperkuat langkah-langkah anti korupsi dan integritas. Lebih lanjut Alfin menyatakan bahwa korupsi di sektor kesehatan masyarakat telah mengakibatkan kerugian lebih dari \$500 Juta USD bahkan dalam situasi non krisis. Dikatakannya, lebih dari 80% dana kesehatan masyarakat bersubsidi tidak sampai ke fasilitas kesehatan di tingkat daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat sipil, terdapat sejumlah permasalahan terkait korupsi di sektor kesehatan masyarakat dan jaminan sosial selama COVID-19. Hal ini meliputi fakta bahwa penerima jaminan sosial tidak menerima bantuan penuh, Bantuan yang diterima hanya setengahnya, pengadaan paket mahal begitu juga kasus paket jaminan sosial yang disalurkan bersamaan dengan afiliasi politik. Alfin menyatakan bahwa ini perlu diubah karena pemerintah harus belajar dari wabah kesehatan masyarakat Ebola dan SARS di masa lalu yang mana efektivitas respons krisis tergantung pada komitmen terhadap perilaku anti korupsi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pada saat yang sama juga perlu dilakukan analisis risiko. Lebih lanjut, Alfin mengatakan, pendekatan penanganan COVID-19 perlu diintegrasikan dengan langkah-langkah antikorupsi.

After the showcasing of local governments innovations, the webinar continued with representatives of Media Link and Transparency International. During their presentation, Transparency International Indonesia Researcher Alfin responds to 2 crises at once that includes COVID-19 pandemics and corruption where Alfin from TII believes that a crisis should be an opportunity to strengthen anti corruption and integrity measures. Alfin further stated that corruption in the public health sectors have already resulted in loss of more than \$500 Million USD even in non crisis situations. He stated that more than 80% of subsidized public health funds did not reach health facilities on a local level.

Based on the research that has already been done by the civil society, there's a number of problems in relation to corruption in the public health sectors and social securities during COVID-19. This includes the fact that the social security recipients do not receive full help, only half of the help ,the procurement of the package is expensive as well as social security packages being distributed alongside with political affiliations. Alfin stated that this needs to change where the government should learn from the past Ebola and SARS public health outbreak where the effectiveness of the crisis response depends on the commitment for anti corruption behaviour, transparency and accountability. This should be done in order to improve public trust and at the same time, risk analysis needs to be conducted as well. Alfin further stated that the approach on COVID-19 handlings needs to be integrated with anti corruption measures.

Ini harus mencakup penguatan layanan pengawasan, penguatan aspek pengembangan kapasitas kelembagaan untuk mengintegrasikan langkah-langkah anti korupsi. Perlu adanya upaya memastikan bahwa ada proses pengadaan yang transparan dan akuntabel untuk jaminan sosial. Terakhir, pemerintah juga harus memperkuat kualitas pengelolaan dana melalui teknologi dan inovasi.

Pembicara terakhir webinar adalah Ibu Yenti Nurhidayat dari Seknas Fitra. Dalam sesi ini, Ibu Yenti membeberkan hasil penelitian bersama dengan BAPPENAS melalui data kuantitatif dan kualitatif terkait upaya pemerintah dalam mengalokasikan dana terkait COVID-19 serta komitmen menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Pertama, Ibu Yenti menyatakan bahwa implikasi UU No 2 Tahun 2020 telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pengelolaan subsidi di tingkat pemerintah daerah yang mana besaran subsidi yang dialokasikan akan bergantung pada dampak COVID-19 di masing-masing daerah. Terkait dengan hal tersebut, sebagian besar pemerintah daerah akan beradaptasi melalui peningkatan tingkat kemiskinan dan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan serta peningkatan rasio pengangguran.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat wilayah dengan target optimis (kontraksi ekonomi mencapai - 1 hingga -3%) sedangkan wilayah survei lainnya memperkirakan -5% dari kontraksi tersebut. Pada bagian awal survei, hanya 24 provinsi, 64 kabupaten dan 16 kota yang menjawab kuesioner yang berisi pertanyaan tentang perubahan dalam kaitannya dengan adaptasi indikator makro lokal. Hal ini mengakibatkan realisasi pendapatan daerah untuk seluruh provinsi, baru mencapai 60,37% yang mana realisasi belanja provinsi hanya mencapai 46,99%.

This should include strengthening oversight services, strengthening the institutional capacity building aspect to integrate anti corruption measures. This would include making sure that there's a transparent and accountable procurement process for social securities. Lastly, the government should also strengthen the quality of funds management through technology and innovations.

The last speaker of the webinar is Mrs Yanti Nurhidayat from Seknas Fitra. During this session, Yanti discloses the joint research with BAPPENAS findings through quantitative and qualitative data in regards to government efforts in allocating COVID-19 related funds and the commitment to uphold transparency and accountability. Firstly, Yanti stated that the implications of Law No 2 Year 2020 has resulted in the shifting of subsidies management at the regional government level where the amount of the allocated subsidies will depend on the effect of COVID-19 in each respective area. In relation to this, most local governments will adapt to it through the increase in poverty level and percentage of people living in poverty as well as increasing the ratio for unemployment.

Based on this, there are areas with optimistic targets (Economy contraction reaches - 1 to -3%) while the rest of the surveyed areas predicted -5 of the said contractions. During the initial part of the survey, only 24 provinces, 64 municipalities and 16 cities responded to the questionnaire containing the question of changes in relations to local macro indicator adaptations. This resulted in the realization of regional income for all provinces has only reached 60.37% where the realization of provincial expenditures is only up to 46.99%.

Meskipun ada laporan keterlambatan dalam kapasitas adaptasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, Ibu Yenti mencatat bahwa ada beberapa upaya adaptasi dan praktik baik yang harus dicontoh misalnya Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Sigi dan Kota Dumai. Di Riau, pemerintah daerah memiliki kisah sukses dalam menjaga ketat protokol kesehatan dalam transportasi laut. Di Kabupaten Sigi, pemerintah daerah memberlakukan 3000 meter lahan pertanian untuk keperluan ketahanan pangan selama pandemi. Terakhir, kota Dumai memberlakukan kebijakan kerja yang lebih manusiawi di mana metode shift diperkenalkan di tempat kerja dan penyesuaian jam kerja juga sedang diadaptasi.

Menutup Webinar, Ibu Yenti menyampaikan beberapa catatan dari koalisi masyarakat sipil terkait penegakan transparansi dan akuntabilitas penanganan COVID-19 di tingkat lokal. Hal ini termasuk kurangnya ketersediaan alat kesehatan di tingkat daerah yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas adaptasi dalam hal pendanaan kesehatan. Situasi ini juga dibarengi dengan kurangnya transparansi dan efektivitas di bidang pengadaan alat kesehatan. Kedepannya, Ibu Yenti bersama koalisi masyarakat sipil berharap situasi ini bisa lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Even though there are reported lateness within the adaptation capacity for local government income and expenditures, Yanti noted that there are some notable adaptation efforts and best practices that need to be noted. This includes Riau Islands Province, Sigi Regency and Dumai City. In Riau, the local government has a success story in maintaining strict health protocols towards sea transportation methods. In Sigi Regency, the local government enacted a 3000 metres agricultural lands for food security purposes during the pandemic. Lastly, Dumai city enacted more humane working policies where shift methods were introduced in workplaces and adaptations in regards to working hours were being adapted as well.

To conclude the Webinar, Yanti stated a few notes from the civil society coalition in regards to upholding transparency and accountability for COVID-19 handlings on a local level. This includes the lack of availability of health equipment on a regional level based on the lack of adaptation capacity in regards to health funding. This situation is also paired with the lack of transparency and effectiveness in the procurement area of health equipment. In the future, Yanti alongside the civil society coalition hoped that this situation shall be improved more in the future.